

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengertian dasar akuntabilitas menurut Roberts & Scapens (1985) didalam Ahyaruddin (2017) adalah suatu hubungan pemberi, penerima, dan pihak lain di luar diri mereka tentang suatu hubungan yang dapat diterima secara akal sehat. Pengertian ini di satu sisi mengamsumsikan bahwa setiap individu atau kelompok harus mempunyai kepastian hubungan yang menjadi dasar untuk melakukan suatu aktivitas, namun disisi lain diri mereka terdapat pihak lain yang juga berkepentingan dengan individu dan kelompok untuk memperhatikan kepentingan mereka dalam bentuk tanggung jawab sosial dan moral. Pentingnya memperhatikan aspek sosial dan moral tersebut kemudian digarisbawahi sebagai salah satu aspek akuntabilitas. Dengan pemahaman demikian, maka akuntabilitas tidak terbatas pada pertanggungjawaban akan sesuatu yang diserahkan antara dua pihak, tetapi juga dengan pihak lain yang terkait dengan individu atau kelompok tersebut yang mengedepankan aspek sosial dan moral. Pihak lain ini kemudian lebih dikenal sebagai *stakeholder*.

Pelaporan keuangan sangatlah penting bagi perseorangan, perusahaan, pemerintah, maupun bagi organisasi-organisasi yang lain dalam rangka mempertanggungjawabkan segala aktivitas bisnis maupun non bisnis. Hal ini juga bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu untuk kepentingan pihak internal maupun pihak eksternal. Desakan dari para stakeholder akan pentingnya pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi dan rasa keadilan didalam setiap organisasi merupakan fenomena

yang harus dicermati oleh setiap organisasi agar organisasi tersebut dipercaya oleh para *stakeholder*.

Akuntabilitas sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting. Akuntabilitas menjadi indikator penilaian terhadap kinerja sebuah organisasi. Pengelolaan yang transparan menjadikan sebuah organisasi dapat dipercaya baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Semua organisasi pada tingkat apapun dituntut untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Organisasi nirlaba yang merupakan sebuah organisasi dengan tujuan bukan untuk mencari laba, juga dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban secara transparan.

Penelitian ini ingin melihat akuntabilitas sebuah institusi sosial yang fokus utamanya adalah memelihara iman dan tujuan hidup. Hal ini menjadikan organisasi sosial terutama gereja memiliki nilai dan makna bagi pengikutnya Berry (2005) di dalam Halik (2019). Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, organisasi gereja pun ikut menyesuaikan pelayanannya dengan kebutuhan umatnya. Tidak hanya berkaitan dengan pelayanan spiritual, gereja juga dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan asset yang dimiliki oleh gereja.

Akuntabilitas dalam organisasi gereja menurut Berry (2005) di dalam Halik (2019) dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu akuntabilitas berdasarkan perjanjian, konstitusi, dan kontrak. Akuntabilitas berdasarkan perjanjian meyakini bahwa otoritas tertinggi berasal dari Tuhan yang diwujudkan melalui baptisan dalam roh kudus. Adanya ikatan kuat antara Allah sang pengasih dan umatnya yang taat menjadi dasar pertanggungjawaban yang transparan karena adanya perasaan saling percaya sebagai umat Allah. Akuntabilitas berdasarkan

konstitusi berhubungan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan, akuntabilitas kontrak merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja dan sumber daya yang telah tersedia.

Banyak hal yang membedakan organisasi nirlaba dengan organisasi berorientasi laba. Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dan hasil usaha organisasinya, berbeda dengan organisasi nirlaba. Tetapi sama halnya dengan organisasi laba, organisasi nirlaba juga harus memberikan dan menyajikan informasi keuangan kepada publik internal ataupun eksternal melalui laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk utama dari akuntansi. Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atau penggunaan sumber-sumber daya yang di percayakan kepada mereka.

Entitas berorientasi nirlaba adalah entitas yang tidak bertujuan untuk memupuk keuntungan, selain itu entitas berorientasi nirlaba memiliki perbedaan karakteristik dengan entitas bisnis yaitu memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Definisi entitas berorientasi nirlaba yang lain adalah sebagai sebuah organisasi yang tidak bertujuan mencari laba, misalnya organisasi keagamaan, yayasan atau lembaga pendidikan.

Organisasi Keagamaan atau Organisasi Gereja merupakan salah satu bentuk organisasi berorientasi laba dalam bidang keagamaan yang mewujudkan akuntabilitas keuangan melalui pelaporan keuangan. Entitas berorientasi nirlaba didirikan dengan tujuan untuk pelayanan publik secara umum. tetapi organisasi tersebut juga tidak luput dari berbagai kritik dan tuntutan agar gereja terbuka dan melaksanakan praktik akuntabilitas.

Menurut (Neor,2010) organisasi nirlaba di indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada prioritas kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pelaporan keuangan. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik diyakini merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga. Pengetahuan dari staff keuangan mengenai pengelolaan keuangan yang handal dibutuhkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup.

Gereja yang merupakan organisasi berorientasi nirlaba diwajibkan untuk membuat dan melaporkan masuknya uang yang mengalir dalam gereja serta keluarannya kas untuk mendanai kegiatan operasional gereja sebagai pertanggungjawaban bagi seluruh jemaat dan para donatur yang telah memberikan sumbangannya yang diharapkan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas. Selain itu, organisasi gereja juga tidak terlepas dari tantangan, tantangan yang dihadapi gereja tidak hanya menyangkut aspek pelayanan pastoral tetapi menyangkut pengelolaan keuangan gereja. Salah satu aspek di dalam gereja yang sering menimbulkan kemelut adalah dalam hal penyajian laporan keuangan Gereja.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban harta milik organisasi gereja khususnya gereja toraja berada pada majelis gereja, sehingga untuk

menggunakannya secara tepat gereja membutuhkan sistem penyajian laporan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan dalam gereja toraja meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan dan pemeriksaan keuangan dan hak milik gereja toraja pada badan di semua lingkup persidangan gereja toraja. Gereja memerlukan akuntansi sebagai alat bantu dalam pengelolaan, perencanaan dan pengawasan keuangan. Akuntansi menghasilkan informasi yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan, informasi itu sendiri adalah data atau fakta yang diolah dan disajikan dengan cara tertentu sehingga mempunyai makna bagi yang berkepentingan atau bagi yang dituju oleh informasi tersebut. Informasi yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan haruslah lengkap, transparan dan menunjukkan tingkat akuntabilitas.

Informasi kualitatif yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan merupakan salah satu aspek informasi dalam bentuk laporan pengelolaan aktivitas dan berbagai bentuk dan isi. Dalam praktik bisnis sering dijumpai bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum disingkat PABU. Prinsip tersebut pada dasarnya akan menentukan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan bebas menggunakan metode akuntansi selama metode tersebut diterima dalam praktik bisnis. Hal ini berarti gereja juga dapat membangun praktik akuntansi yang mengacu PABU berdasarkan karakteristik yang ada dalam organisasi gereja.

Penelitian terhadap organisasi gereja khususnya yang berhubungan dengan penyajian dan pertanggungjawaban laporan keuangan organisasi gereja masih sangat terbatas. Disamping itu juga gereja toraja belum melakukan praktik akuntansi yang mengacu pada PABU dalam mengelola keuangannya. Berdasarkan permasalahan yang terjadi didalam organisasi gereja maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penyajian laporan keuangan organisasi gereja khususnya pada Gereja Toraja.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akuntabilitas dalam mengelola keuangan Gereja Jemaat Bethel Padang Katapi sebagai organisasi nirlaba.

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas keuangan Gereja Toraja Jemaat Bethel sebagai organisasi nirlaba.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai akuntabilitas yang disajikan oleh Gereja sebagai salah satu entitas yang berorientasi nirlaba.
2. Manfaat praktis  
Bagi Gereja Toraja Jemaat Padang Katapi Palopo, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Gereja agar lebih meningkatkan akuntabilitas organisasi nirlaba.